



IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI DESA BOBISINGO GALELA UTARA

¹Misrina Sergie, ²Mohtar Kamisi, ³Fahmi Bulele

^{1, 2, 3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Khairun

Email: [misrinaserגיע@gmail.com](mailto:misrinaserгие@gmail.com)

Diterima : 03-03-2024

Direvisi : 12-03-2024

Dipublikasi : 10-04-2024

Abstract

The results of the research show that politics is basically a phenomenon that is closely related to humans and human actions themselves, which by nature always live together with each other. Humans are social creatures, dynamic and developing and able to adapt to the environment or surrounding circumstances. As members of society, we are of course bound by the general values and rules that are recognized and acknowledged by the community itself. Therefore, politics will always manifest and manifest itself within the framework of the process of human development, with the interrelation of things above humans and of course the essence of political practice itself, whatever the reasons and observations or political analysis, cannot simply leave humans alone. This shows that the essence of politics is human behavior, whether in the form of activities aimed at influencing or maintaining a social order of life by using their respective powers.

Keywords: Political Education, Pancasila, Bobisingo Village.

PENDAHULUAN

Terdapat beberapa aspek pendidikan telah dikenal oleh khalayak pada umumnya yang berkaitan dengan corak sosial, sebagaimana perilaku tersebut ada pendidikan formal, informal, dan non formal. Ketiga aspek pendidikan ini memiliki makna koheren sesuai dengan prinsip pendidikan bahwa pendidikan sendiri adalah proses pembaharuan pola pikir dan tingkah laku manusia yang lebih manusiawi, sehingga demikian mengapa pentingnya pendidikan, karena pendidikan merupakan alat ukur bagi kemajuan bangsa dan negaram yang termaktub dalam UUD 1945 tepatnya pada alinea kedua. Pendidikan politik dilandasi oleh Pasal 11 huruf a hingga e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Partai politik berfungsi sebagai a) sarana pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasrakat, berbangsa dan bernegara; b) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; c) penghisap, merangkul, dan pendistribusi aspirasi politik masyarakat dalam perumusan dan menetapkan keputusan negara; d) partisipasi politik warga negara Indonesia; e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain a) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara; b) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara; c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas. Karena dengan adanya kader-kader yang berkualitas bisa mengukur eksistensi partai politik dalam persaingan perebutan kekuasaan yang sah. Pendidikan politik harus diberikan kepada kader-kader partai politik dan masyarakat umum, bahwa partaipolitik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara (Budiardjo, 2008).

Politik di Indonesia tidak seperti apa yang diinginkan, karena seluruh partaipolitik baik yang lama maupun yang baru berdiri kurang maksimal dalam memberikan pendidikan politik. Hal ini bisa terjadi seperti maraknya *money politics*, angka golput tinggi karena kurang kesadaran masyarakat dalam memberikan haknya dalam pemberian suara. Dengan masalah-masalah mengenai perpolitikan yang berhubungan dengan kepemiluan sangat kompleks sehingga masyarakat dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih tentang politik. Partai politik mempunyai kewajiban dalam mencerdaskan masyarakat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Partai politik mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat. Kelalaian daripada partai politik dan juga kurangnya pengembangan literasi soal pendidikan politik terhadap masyarakat yang mestinya itu diinisiatif oleh instansi pemerintah terkait memberikan pemahaman tentang bagaimana jadi pemilih atau sebagai partisipasi politik lebih mengedepankan pemahaman tentang pendidikan politik agar tidak memilh seorang pemimpin untuk menduduki jabatan jabatan strategis yang hanya mendahului kepentingan kelompoknya daripada kemaslahatan rakyat.

Keberlangsungan pemahaman tentang pendidikan politik tersebut jarang sekali kita

temukan di partai politik dan lembaga pemerintahan terjun langsung memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Indonesia memiliki sejarah pendidikan politik cukup panjang perjalanannya dengan dua peristiwa sejarah sangat bersahabat di dunia pendidikan dan politik, pada tahun 1965-1966 ditandai runtuhnya Orde Lama dan tahun 1998 runtuhnya Orde Baru. Konflik di dua tahun yang berbeda tersebut merupakan satu cerminan kelalaian edukasi pendidikan politik yang tidak dilaksanakan oleh lembaga lembaga terkait sehingga menimbulkan kekacauan yang cukup merugikan kita semua sebagai warga negara Indonesia.

Pendidikan politik saat ini boleh dikatakan sebagai pengembangan sesuai dengan misi pendidikan sesungguhnya berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Dari uraian tersebut kenapa pentingnya pendidikan politik ditingkat formal, informal, dan non formal. Atas dasar keterangan di atas, penting untuk melihat dan mengetahui sejauh mana keefektifan pendidikan politik di masyarakat sehingga mendorong penelitian tentang Implementasi Pendidikan Politik Berbasis Nilai-Nilai Pancasila di Desa Bobisingo Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya di manfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Perlu dikemukakan, karena metode penelitian yang dipakai merupakan metode kualitatif. Lumrah alasan memakai metode kualitatif sebab permasalahan tidak jelas, holistik, kompleks, dinamis dan makna.

Lokasi Penelitian

Tempat penelitian di Desa Bobisingo, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Penentuan lokasi ini dengan pertimbangan masalah-masalah serta lebih muda untuk dijangkau oleh peneliti, sehingga mempermudah peneliti mendapatkan data dengan masalah- masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Prosedur pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan data. Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah (1) observasi (pengamatan), (2) wawancara, dan (3) dokumentasi

Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, di mana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisis dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Politik Berbasis Nilai-Nilai Pancasila pada Masyarakat Desa Bobisingo

Berdasarkan observasi awal untuk melihat bagaimana pendidikan politik dalam masyarakat di Desa Bobisingo, terdapat masyarakat sangatlah memiliki tingkat kesadaran politik yang melekat sekali dengan corak masyarakat di desa tersebut, sehingga mereka sungguh tidak lagi mengharapkan adanya sosialisasi berkaitan soal pendidikan politik karena tingkat pemahaman dasar tentang politik masyarakat suda lahir sejak terjadinya konflik pada tahun 1999-2000 yang menjadi dasar pijak pemahaman tentang politik. Peneliti melakukan wawancara kepada berbagai subjek masyarakat diantaranya, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala desa dan masyarakat. Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap subjek terkait dengan sosialisasi pendidikan politik berbasis nilai Pancasila yang dilakukan oleh lembaga resmi negara dan pemerintah daerah kepada masyarakat di Desa Bobisingo.



Foto 1 dan 2. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

Sosialisasi Politik

Tingkat kesadaran masyarakat di atas tidak juga terlepas dari nilai-nilai budaya, agama, dan sosial ekonomi. tokoh adat, menjelaskan bahwa tingkat kesadaran dan cara pandang masyarakat tentang politik yang baik sungguh sangat lah tidak diragukan lagi, meskipun masyarakat suda tidak membutuhkan sosialisasi atau pendidikan politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi seperti partai, pemerintahan dan lembaga terkat lainnya akan tetapi tugas dan fungsi partai serta peran tokoh-tokoh yang berda di desa tersebut suda tentu sadar akan hal itu, sebagaimana partai dalam UUD kepartaian sendiri.

Masyarakat juga punya kesadaran toleransi sangat tinggi yang di jaga selama kurang lebih 20 tahun ini, toleransi tersebut dijaga untuk kelangsungan hidup manusia sebagai

makhluk sosial diantaranya toleransi agama, suku, hak, dan nilai toleransi lainnya yang tidak mencedraai sisi kemanusiaan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Tokoh Agama (DHJ) menjelaskan adanya mayoritas masyarakat di Desa Bobisingo ini adalah Islam, makah tidaklah heran bahwa tingkat kesadaran dan pandangan politik masyarakat selalu bersandar pada syariat agama yang berkaitan dengan kepemimpinan serta aktifitas keseharian masyarakat. “Kebiasaan ini sudah menjadi pandangan umum untuk kami sebagai tokoh agama dan masyarakat di desa ini, dan bagi kami bukan tidak ingin adanya sosialisasi politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi untuk memberikan pandangan tentang politik yang baik sebagai warga negara Indonesia”.

Pandangan dan kesadaran ini akan kami jadikan sebagai penglihatan untuk memilih pemimpin daerah, perwakilan, serta kepala desa nantinya di pemilu 2024 mendatang untuk menjadi seorang pemimpin dan memimpin negara, daerah dan desa. Tolok ukurnya adalah dia beragama dan diakui oleh negara dan masyarakat. Karena agama merupakan satu pedoman penting untuk menjaga keutuhan serta kesatuan negara dan bangsa yang ada dalam bingkai Pancasila dengan berbagai suku, ras, budaya, agama, dan kehidupan sosial umum. Kesadaran politik ini kami pertahankan di masyarakat Desa Bobisingo agar masyarakat tidak menggunakan kesadaran dan hak politiknya dengan sangat tidak sesuai asas agama dan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.

Kepala desa (BM) menjelaskan bukanya saya atau kami pemerinta desa menolak adanya sosialisasi yang baik terkait dengan pembentukan kesadaran masyarakat tentang pendidikan politik yang baik, Namun untuk kesadaran masyarakat sendiri disini sangatlah tinggi terkait dengan politik sala satunya, selain itu masyarakat di Desa Bobisingo juga punya kesadaran dan pandangan sosialnya menyangkut gotong royong, bermusyawara, dan rukun bertetangga. Inilah kenapa saya sebagai kepala desa mengatakan bukanya menolak tetapi meskipun tidak ada namanya sosialisasi terkait dengan pendidikan politik yang berbasis nilai Pancasila, tingkat pemahaman dan cara pandang masyarakat masih sangatlah baik dan masi sesuai dengan nilai-nilai ideologi. Kalaupun ada sosialisasi yang ingin dilakukan oleh lembaga resmi kami sebagai pemerinta desa justru sagat menerima dengan baik untuk kelansungan cara pandang masyarakat yang baru sesuai perkembangan zaman.

Namun sejauh ini kami pemerintah desa dan tokoh-tokoh serta masyarakat belum melihat adanya satupun lembaga resmi pemerintahan bahkan pasrtai dan juga LSM yang melakukan sosialisasi terkait dengan pendidikan politik yang berbasis Pancasila sampai saat ini. Padahal jika ada yang melakukan sosialisasi tersebut kami sangat antusias untuk melakukan kerja sama karena menurut kami sosialisasi seperti begitu sangatlah baik untuk membuka cara pandang masyarakat yang baru.



Foto 3 dan 4. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

Pemahaman Dasar Politik

Pemahaman politik mencakup tentang pemahaman prinsip-prinsip dasar politik, proses politik, lembaga politik, dan peran warga negara dalam sistem politik. Politik Penting bagi setiap warga negara karena politik dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari dan arah negara. Dengan pemahaman yang baik dari konsep-konsep ini, individu dapat lebih efektif berpartisipasi dalam proses politik dan membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang kuat.

RA, tokoh pemuda, menjelaskan tingkat pemahaman dikalangan pemuda terkait pengetahuan tentang politik sejauh ini, pemudha-pemudi masih memiliki sedikit pemahaman tentang bagaimana berpolitik dan seperti apa itu politik yang baik. Jelas adanya bahwa pemudha-pemudi yang ada di desa ini masi sangat membutuhkan adanya sosialisasi terkait dengan teori dan praktek politik yang baik, untuk itu saya sebagai tokoh pemuda sadar betul meskipun sebagian besar masyarakat yang ada sudahmemiliki pemahaman yang kuat tetapi sebagian kecil juga masi belum memahami betul prinsip-prinsip yang paling dasar dari politik.

Wawancara dengan EJ masyarakat, tingkat pemahaman kami masyarakat Desa Bobisingo tentang politik yang baik kami cukup memahami apa itu politik hanya sebatas praktik tidak lebih dari mereka yang lain memahami praktik dengan teorinya namun kami juga tau bahwa praktek yang kami lakukan tidak terlalu jauh keluar dari teori yang mereka pelajari di bangku-bangku pendidikan kalian dan meraka masing-masing. Untuk sosialisasi atau pemberian pemahaman kepada kami, kami juga sangat membutuhkan itu sebenarnya, akan tetapi sejauh perkembangan pemilu berapakali di desa kami ini belum ada satupun yang melalukan sosialisasi atau apalah itu dari pihak mana pun hingga sampai saat ini dimomen menjelang pemilu 2024 tidak ada sama sekali.



Foto 5 dan 6. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

Alfian dalam jurnal Nasiwan, hal yang serupa dengan hasil wawancara di atas bahwa pendidikan politik dimaknai sebagai tindakan yang terencana, dengan sadar untuk memberikan penyadaran kepada warga negara yang sudah berhak memilih. Tujuan dari pendidikan politik yang terpenting adalah membentuk kesadaran warga negara tentang hak dan kewajiban sesuai dengan konstitusi.

Pandangan Freire (200; 01) juga persis sama bahwa pendidikan adalah menumbuhkan kesadaran kritis transitif, yang bermaksud bahwa seseorang mencapai tingkat kesadaran, tetapi belajar juga bagian dari proses bergerak dari kesadaran pada masa kini ke tingkat kesadaran berikutnya.

Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Politik di Desa Bobisingo

Tingkat kesadaran politik masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi pandangan dan tindakan atau perilaku politik setiap individu dan beberapa faktor yang berperan dalam membentuk tingkat kesadaran politik masyarakat.

a. Faktor Internal

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang terdapat ada pengaruh terlebih dahulu sebelum adanya penyadaran secara eksternal;

1. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kesadaran politiknya, orang yang terdidik lebih cenderung memiliki pemahaman baik isu-isu politik dan mungkin lebih aktif berpartisipasi dalam prakteknya.
2. Kesadaran alami/insting atau bawaan dari diri sendiri tanpa menyamp pendidikan formal.
3. Kepemimpinan dan etika dapat mempengaruhi tingkat kesadaran politik individu.

b. Faktor Eksternal

Kepala desa, ada juga terdapat pengaruh kesadaran politik lain untuk tingkat kesadaran masyarakat yang ada dalam ketidak raguan mengambil keputusan dalam kondisi apapun. Media masa, seperti surat kabar, televisi, radio, dan media sosial, memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesadaran politik. Budaya politik lokal juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat, Ekonomi dan sosial, Isu-isu dan kontroversial, organisasi masyarakat sipil. Berdasarkan hasil wawancara di atas faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat Desa Bobisingo cukuplah beragam untuk

menanggapi perilaku politik yang dahulu dan berkembang sekarang.



Foto 7 dan 8. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

c. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan sendiri juga dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dan kesadaran politik sehingga berakibat pada tindakan politik sendiri yang jauh dari teori serta nilai-nilai kemasyarakatan untuk berdialog, misalnya, di masyarakat Desa Bobisingo sendiri masih banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan formalnya sampai ke perguruan tinggi hanya pada jenjang sekolah menengah atas bahkan ada juga tidak sama sekali, dari aspek-aspek inilah bagaimana kita bisa melihat secara gamblang bahwa masyarakat masi memiliki sedikit kurangnya pemahaman tentang politik secara prinsipil dan tindakan juga perkembangan politik saat ini yang menjadi ajang penentu arah bangsa.

d. Isu-Isu Kontroversial

Hampir dari sekian masyarakat di Desa Bobisingo sebagian kecil masi terpengaruh dengan adanya perkembangan informasi yang bersifat kontroversi ketika berkembang di lingkungan masyarakat kata lain dari faktor ini meliputi perpecahan nilai-nilai kerukunan bertetangga, persatuan, sebagai warga negara yang baik karena perkembangan isu-isu tersebut di dalamnya terdapat mengadung sara sehingga memprovokatif pada masyarakat dan pada akhirnya terjadi konflik apalagi dengan adanya momen akbar ini di tahun 2024 terkait pemilihan umum.

Faktor kontroversial inilah yang merupakan salah satu menurunnya tingkat pemahaman masyarakat dan tindakan sebagai manusia yang memberi dan menerima informasi terkait dengan bagaimana menjaga etika politik yang damai tanpa mencela satu dengan yang lain sehingga politik tidak dilihat sebagai perebutan kekuasaan sepihak dan dijadikan pemahaman yang paling prinsipil dari politik oleh masyarakat di Desa Bobisingo yang saat ini menghadapi pemilihan umum tahun 2024.

e. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi bermuatan norma dan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kelemahan tersendiri bagi masyarakat untuk tingkat pemahaman sistem politik dalam negara sendiri sebagai bentuk membaca isu-isu dan menentukan pilihan sebagai pemilih yang baik berdasarkan pertimbangan musyawara bersama masyarakat yang lain. Kenapa penting, karena

dengan adanya sosialisasi terkait dengan pendidikan politik sendiri merupakan keharusan yang dilakukan oleh lembaga- lembaga resmi seperti partai dan pemerintah sebagaimana perintah konstitusi dan UUD yang berlaku di negara ini.

Sosialisasi tersebut harus dilakukan jauh sebelum mendekati pemilu sebagaimana mestinya harus dilakukan untuk membentuk tindakan serta sikap bagaimana langkah menghadapi momen politik yang terjadi lima tahun sekali pascapemilu telah berjalan, faktor ini juga sangat penting karena dengan adanya sosialisasi terkait dengan politik serta sistem yang ada di negara ini merupakan sebuah edukasi yang harus diterima oleh seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali masyarakat Desa Bobisingo.

KESIMPULAN

Pendidikan politik masyarakat Desa Bobisingo dilakukan dengan meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai Pancasila untuk membentuk tindakan politik yang mencerminkan spirit Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Leo dan Suparman, (2012: 1-3) *sejarah pendidikan*, Penerbit Ombak.
- B. Nambo Abdulkadir. *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik*, Volume XXI Nomor 2, April 2005, halaman 265.
- Budiardjo. Miriam: (2008: 513) *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Deny Noer Wahid: *Atualisasi NILAI Pancasila Terhadap Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi PANCASILA*: Pancasila Jurnal Keindonesiaan, Vol. 03, No. 01, April 2023, halaman 57-69.
- Fadhilah Salsabila Riadi a, 1, Dini Anggraeni Dewi a, 2, (Eksistensi dan Penguatan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila di Masyarakat pada Era Revolusi Industri 4.0) (Volume 1, Nomor 5 September Tahun 2021) hlm, 139.
- Hermawan Candra (Edisi Mare 2020). *Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia*. Volume 10 Nomor 1.
- Jimly Asshiddiqie. *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*. (2010: 5).
- Luh Putu Swandewi Antar, *Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguat Karakter Bangsa* Vol. 21 No. 2 (Oktober 2020).
- Nurani Soyomukti.: *Teori-Teori Pendidikan, tradisional, neolib, sosialis, dan posmoderenisme* (AR-RUZZ MEDIA. 2010: 28-40).
- Puji Wibowo, 2013:11. *Pelaksanaan Pendidikan Politik*.
- Rachmad Budianto. *Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 1, 2017: 93-106
- Suyahmo. *Filsafat Pancasila* (Magnum Pustaka Utama, 2014: 153,173).
- Siti Murtiningsih. 2014. *Pendidikan Alat Perlawanan,, teori pendidikan radikal* Paulo Freire. Yogyakarta: RESIT Book.
- Sjamsi Pasandaran, *Politik Pendidikan Karakter*, Jurnal Civic Education. Volume 1, Nomor 2. (Desember 2017).